

## **Dampak alokasi dana perimbangan (DAU, DAK, DBH) terhadap tingkat ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi Periode 2010-2019**

**Muhamad Sidik\*; Syurya Hidayat; Muhammad Ridwansyah**

Prodi Magister Ilmu Ekonomi, Program Pascasarjana, Universitas Jambi

*\*E- mail korespodensi : aschandra22@gmail.com*

### **Abstract**

*This study aims to analyze 1) How is the development of the allocation of balancing funds (DAU, DAK, and DBH) in Jambi Province 2) What is the condition of the level of inequality between regions in Jambi Province 3) How does the allocation of balancing funds (DAU, DAK, and DBH) affect the level of inequality between regions in Jambi Province. The analysis used is a descriptive quantitative analysis and uses secondary data. From the results of this study, it was found that the development of the allocation of Balancing Funds (DAU, DAK, and DBH) in Jambi Province tends to increase. The development of the level of inequality between regions in Jambi Province tends to decline. The average value of Williamson Index Jambi Province in 2010-2019 is 0.47, so it can be concluded that the level of inequality between regions in Jambi Province is in the medium category. DAU and DAK have a significant effect on the level of inequality between regions in Jambi Province, while DBH does not have a significant effect on the level of inequality between regions in Jambi Province.*

---

**Keywords:** Balance funds (DAU, DAK, DBH), Inequality level

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 1) Bagaimanakah perkembangan alokasi dana perimbangan (DAU, DAK, dan DBH) di Provinsi Jambi 2) Bagaimana kondisi tingkat ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi 3) Bagaimana pengaruh alokasi dana perimbangan (DAU, DAK, dan DBH) terhadap tingkat ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dan menggunakan data sekunder. Dari hasil penelitian ini didapati Perkembangan alokasi Dana Perimbangan (DAU, DAK dan DBH) di Provinsi Jambi cenderung mengalami peningkatan. Perkembangan tingkat ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi cenderung mengalami penurunan. Nilai rata-rata Indeks Williamson Provinsi Jambi pada tahun 2010-2019 adalah sebesar 0,47 sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi berada pada kategori sedang. DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap tingkat ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi, sedangkan DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi.

---

**Kata kunci:** Dana perimbangan (DAU, DAK, DBH), Tingkat ketimpangan

### **PENDAHULUAN**

Selama era Orde Baru, seluruh keuangan baik negara maupun daerah dikelola penuh oleh pusat. Pasca reformasi dan digulirkannya otonomi daerah dan desentralisasi, kewenangan-kewenangan untuk menghimpun, mencari serta mengelola sumber-sumber pendapatan diberikan kepada daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah sehingga memungkinkan daerah untuk dapat lebih leluasa dan fleksibel dalam menentukan arah pembangunan di daerah sesuai dengan potensi, kondisi dan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Luasnya kewenangan daerah ini menyangkut semua aspek pemerintah dan masyarakat, kecuali politik luar negeri, pertahanan, keamanan, hukum, moneter dan fiskal serta agama sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal selama pemerintahan Orde Baru belum dapat mengurangi ketimpangan vertikal dan horizontal yang ditunjukkan dengan tingginya derajat sentralisasi fiskal dan besarnya ketimpangan antar daerah serta wilayah (Uppal dan Suparmoko, 1986; Sjafrizal, 1997).

Berdasarkan berbagai literasi, selama dua dekade perjalanan otonomi daerah menunjukkan bahwa dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia ternyata lebih didominasi oleh mekanisme dana alokasi umum yang berfungsi sebagai pemerata fiskal daerah sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Adapun yang diharapkan oleh setiap daerah otonom di masa desentralisasi fiskal ini adalah bagaimana setiap pemerintah daerah berusaha untuk membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerahnya yang akan berpengaruh besar terhadap pembangunan di daerah.

Selama ini, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dari pelaksanaan desentralisasi dan pada umumnya adalah ketidakcukupan sumber daya keuangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mempunyai finansial yang cukup dan lebih leluasa dalam mengelola keuangannya. Pemberian wewenang harus meliputi kewenangan dalam mengelola keuangan (desentralisasi fiskal).

Adapun untuk dana perimbangan di Provinsi Jambi setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah. Namun peningkatan anggaran tersebut memberikan efek yang fluktuatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan semakin timpangnya pembangunan antar daerah. Merujuk pada penelitian Rosmeli (2010), diketahui bahwa semenjak diimplementasikannya desentralisasi fiskal berdampak pada semakin meluasnya disparitas antar wilayah di Indonesia bila dibandingkan dengan sebelum diberlakukannya desentralisasi fiskal yang ditunjukkan oleh Indeks Williamson yang berkisar pada angka 0,8111. Selain itu, selama periode 1990-2008 alokasi dana untuk sektor kesehatan, penanaman modal dalam negeri dan transfer pemerintah pusat ke daerah memperbesar disparitas antar-wilayah di Indonesia, sedangkan alokasi dana untuk pendidikan dan infrastruktur jalan memperkecil disparitas antar-wilayah di Indonesia. Padahal, tujuan dasar kebijakan dana perimbangan adalah untuk pemerataan pendapatan sekaligus mendorong pembangunan di seluruh wilayah di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) perkembangan alokasi dana perimbangan (DAU, DAK, dan DBH) di Provinsi Jambi; 2) perkembangan tingkat ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi; dan 3) pengaruh alokasi dana perimbangan (DAU, DAK, dan DBH) terhadap tingkat ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi.

## **METODE**

### **Jenis dan sumber data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini semuanya adalah data sekunder yang bersumber dari BPS dan Website Kementerian Keuangan RI.

### **Alat analisis data**

Perkembangan Dana Perimbangan (DAU, DAK dan DBH) dianalisis menggunakan data time series yang bersumber dari website resmi Kemenkeu.

Selanjutnya, masing-masing data (DAU, DAK dan DBH) dianalisis perkembangannya berdasarkan jumlah alokasi dana dari tahun 2010-2019 apakah cenderung mengalami peningkatan atau cenderung mengalami penurunan. Analisis data ini menggunakan metode Analisis Deskriptif Kuantitatif. Kondisi tingkat ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi dianalisis menggunakan Indeks Wiliamson. Indeks Wiliamson merupakan indeks yang paling sering digunakan untuk mengetahui tingkat disparitas wilayah secara horizontal. Wiliamson mengembangkan indeks kesenjangan wilayah ini pada 1975. Indeks Kesenjangan dapat dihitung menggunakan rumus Wiliamson sebagai berikut:

$$I_w = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - y)^2 \left(\frac{f_i}{n}\right)}}{y} \quad 0 < I_w < 1$$

Keterangan:

- $I_w$  = Indeks Kesenjangan Wiliamson
- $y_i$  = PDRB perkapita Kab/Kota pada Tahun ke-i
- $y$  = PDRB perkapita Provinsi Jambi
- $f_i$  = Jumlah Penduduk Kab/Kota pada Tahun ke-i
- $n$  = Total penduduk Provinsi Jambi

Nilai  $I_w$  terletak di antara 0 dan 1. Hal ini menunjukkan bahwa: Jika  $I_w = 0$ , berarti pembangunan sangat rata. Jika  $I_w = 1$ , berarti pembangunan wilayah sangat tidak merata. Jika  $I_w = \sim 0$ , berarti pembangunan wilayah semakin merata atau mendekati merata. Jika  $I_w = \sim 1$ , berarti pembangunan wilayah semakin tidak merata atau mendekati merata. Nilai  $I_w$  yang semakin besar menunjukkan disparitas pendapatan antardaerah yang semakin besar. Sebaliknya jika  $I_w$  rendah maka menunjukkan ketimpangan antar daerah semakin kecil. Lebih lanjut, jika  $I_w = 0$ , maka disimpulkan tidak ada ketimpangan di Provinsi Jambi.

Pengaruh dana perimbangan (DAU, DAK, dan DBH) terhadap tingkat ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi dianalisis menggunakan metode Analisis Regresi Log-Berganda. Analisis regresi juga dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel dependen (*criteria*) dapat diprediksi melalui variabel independen (*predictor*). Dampak dari penggunaan analisis regresi dapat digunakan untuk memutuskan apakah naik atau menurunnya variabel dependen dapat dilakukan melalui menaikkan dan menurunkan keadaan variabel independen (Umar, 2003). Besarnya pengaruh variabel bebas secara parsial maupun bersama-sama terhadap variabel terikat dalam penelitian ini dihitung menggunakan *EViews 8*, dan menggunakan model persamaan Regresi Semi-Log Berganda sebagai berikut:

$$I_w = \beta_0 + \beta_1 \ln(DAU) + \beta_2 \ln(DAK) + \beta_3 \ln(DBH) + e$$

Keterangan:

- $I_w$  = Indeks Wiliamson/Ketimpangan
- $a$  = Konstanta
- $\beta_i$  = Koefisien Regresi
- $e$  = Error Term
- $\ln$  = Log
- DAU = Dana Alokasi Umum
- DAK = Dana Alokasi Khusus

DBH = Dana Bagi Hasil

Sebelum dilakukan analisis menggunakan metode Analisis Regresi Semi-Log Berganda, terlebih dahulu dilakukan Uji Asumsi Klasik. Uji Asumsi Klasik terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi dan Uji Heteroskedasitas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil analisis perkembangan alokasi dana perimbangan di Provinsi Jambi

Dana Perimbangan adalah sumber pendapatan daerah di Provinsi Jambi yang berasal dari APBN. Dana Perimbangan di Provinsi Jambi yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder tahun 2010-2019 yang diperoleh dari website resmi Kemenkeu. Data tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan metode Analisis Deskriptif Kuantitatif.

### Hasil analisis perkembangan alokasi DAU di Provinsi Jambi

Dana alokasi umum (DAU) merupakan jenis transfer dana antar tingkat pemerintahan yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu setiap tahun. Dana Alokasi Umum (DAU) yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2010-2019 yang bersumber dari website resmi Kemenkeu RI Tahun 2020 yang dinyatakan dalam satuan ribu rupiah. Perkembangan Alokasi DAU di Provinsi Jambi tahun 2010-2019 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 1.** Alokasi DAU di Provinsi Jambi Tahun 2010-2019 (ribu rupiah)

Kab/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
Kab. Batanghari	277.639.964	344.797.921	427.893.466	507.478.478	527.233.482
Kab. Bungo	311.791.251	379.218.628	456.372.466	523.680.270	579.600.648
Kab. Kerinci	327.334.925	369.050.561	442.627.808	501.185.353	545.365.585
Kab. Merangin	352.586.125	416.126.312	509.653.986	565.160.895	633.657.922
Kab. Ma. Jambi	307.111.978	370.991.039	458.269.264	543.498.995	565.256.883
Kab. Sarolangun	303.551.450	352.955.764	419.840.650	472.596.098	513.112.013
Kab. TanJabBar	210.222.085	279.359.862	329.458.507	387.991.551	429.955.329
Kab. TanJabTim	239.705.236	281.537.710	356.323.443	430.383.112	455.996.416
Kab. Tebo	285.582.492	350.968.800	410.846.427	461.006.766	509.396.969
Kota Jambi	379.188.874	441.548.989	543.578.287	626.331.743	678.620.172
Kota S.Penuh	239.040.161	257.556.166	295.529.443	344.517.814	365.298.130
<b>Total</b>	<b>3.233.754.541</b>	<b>3.844.111.752</b>	<b>4.650.393.747</b>	<b>5.363.831.075</b>	<b>5.803.493.549</b>

  

Kab/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
Kab. Batanghari	517.978.869	610.908.015	611.107.019	605.739.426	627.388.776
Kab. Bungo	580.998.294	641.635.025	641.635.025	635.999.293	656.106.480
Kab. Kerinci	550.843.627	594.747.481	594.747.481	589.202.611	612.248.352
Kab. Merangin	642.011.056	729.326.432	729.326.432	718.849.295	740.887.360
Kab. Ma. Jambi	572.622.998	681.513.626	681.513.626	670.341.091	699.024.250
Kab. Sarolangun	517.687.718	587.491.363	588.319.831	583.152.387	599.555.685
Kab. TanJabBar	386.128.267	507.980.253	538.671.406	506.466.327	536.177.694
Kab. TanJabTim	432.097.281	533.829.506	537.929.801	540.400.531	564.422.212
Kab. Tebo	507.153.153	586.979.793	587.473.427	582.313.417	598.297.279
Kota Jambi	668.201.807	727.564.344	727.564.344	714.783.378	757.404.051
Kota S.Penuh	370.113.129	425.686.742	425.686.742	422.532.652	447.899.516
<b>Total</b>	<b>5.745.836.199</b>	<b>6.627.662.580</b>	<b>6.663.975.134</b>	<b>6.569.780.408</b>	<b>6.839.411.655</b>

*Sumber: Website Kemenkeu RI Tahun 2020(diolah)*

Berdasarkan data pada Tabel 1, perkembangan alokasi DAU setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kabupaten/kota yang paling sering menerima Dana Alokasi Umum (DAU) terendah setiap tahunnya adalah Kota Sungai Penuh (2011-2019), sedangkan pada tahun 2010, Kabupaten/kota yang menerima Dana Alokasi Umum (DAU) terendah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kecilnya realisasi DAU yang diterima Kota Sungai Penuh dan Tanjung Jabung Barat disebabkan sedikitnya jumlah penduduk, indeks kemahalan konstruksi, PDRB perkapita yang rendah, dan beban PNS daerah. Kabupaten/kota yang menerima Dana Alokasi Umum (DAU) tertinggi adalah Kabupaten Merangin dan Kota Jambi. Kabupaten Merangin menerima Dana Alokasi Umum (DAU) tertinggi pada tahun 2016, 2017 dan 2018, sedangkan Kota Jambi menerima Dana Alokasi Umum (DAU) tertinggi pada tahun 2010-2015 dan pada tahun 2019.

Berdasarkan total Dana Alokasi Umum (DAU) dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi, dapat dilihat bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2015 dan 2018. Pada tahun 2015, total Dana Alokasi Umum (DAU) dari 11 kabupaten/kota mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2014, total Dana Alokasi Umum (DAU) dari 11 kabupaten/kota adalah 5.803.493.549 ribu rupiah (5,80 triliun rupiah), sedangkan pada tahun 2015, total Dana Alokasi Umum (DAU) dari 11 kabupaten/kota adalah 5.745.836.199 ribu rupiah (5,74 triliun rupiah). Artinya, total Dana Alokasi Umum (DAU) dari 11 kabupaten/kota pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 57.657.350 ribu rupiah (57,66 miliar rupiah).

Pada tahun 2017, total Dana Alokasi Umum (DAU) dari 11 kabupaten/kota adalah 6.663.975.134 ribu rupiah (6,66 triliun rupiah), sedangkan pada tahun 2018, total Dana Alokasi Umum (DAU) dari 11 kabupaten/kota adalah 6.569.780.408 ribu rupiah (6,57 triliun rupiah). Artinya, total Dana Alokasi Umum (DAU) dari 11 kabupaten/kota pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 94.194.726 ribu rupiah (94,19 miliar rupiah).

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Provinsi Jambi dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus (DAK) yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010-2019 yang bersumber dari website resmi Kemenkeu yang dinyatakan dalam satuan ribu rupiah. Perkembangan alokasi DAK di Provinsi Jambi tahun 2010-2019 disajikan pada Tabel 2.

Setiap tahunnya, jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima oleh setiap kabupaten/kota bersifat fluktuatif (pola perkembangannya tidak tetap/berbeda-beda). Artinya, jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima oleh setiap kabupaten/kota terkadang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun terkadang juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Kabupaten/kota yang paling sering menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) terendah setiap tahunnya adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tercatat bahwa pada tahun 2010 dan 2011 jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebesar nol rupiah, pada tahun 2012 sebesar 3.750.500 ribu rupiah (3,75 miliar rupiah), pada tahun 2013 sebesar 3.548.560 ribu rupiah (3,55 miliar rupiah), pada tahun 2014 sebesar 540.720 ribu rupiah (540,72 juta rupiah) dan pada tahun 2015 sebesar 5.467.508 ribu rupiah (5,47 miliar rupiah). Kota Sungai Penuh menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) terendah pada tahun 2017 dan 2019. Pada tahun 2017, Kota Sungai Penuh menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 97.175.217 ribu rupiah (97,18 miliar rupiah) dan pada tahun 2019 sebesar 112.798.570 ribu rupiah (112,80 miliar rupiah). Pada tahun 2016, kabupaten/kota yang

menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) terendah adalah Kabupaten Muaro Jambi (25.489.715 ribu rupiah atau 25,49 miliar rupiah) dan pada tahun 2018, kabupaten/kota yang menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) terendah adalah Kabupaten Kerinci (52.270.604 ribu rupiah atau 52,27 miliar rupiah).

**Tabel 2.** Alokasi DAK di Provinsi Jambi Tahun 2010-2019 (Ribu Rupiah)

Kab/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
Kab. Batanghari	40.149.000	31.426.100	32.010.910	49.684.450	28.209.030
Kab. Bungo	5.572.760	48.635.800	40.226.240	54.327.910	61.138.860
Kab. Kerinci	44.282.600	48.914.500	56.523.520	60.810.270	50.485.980
Kab. Merangin	45.982.275	46.346.300	46.655.450	51.814.890	49.331.620
Kab. Ma. Jambi	47.124.000	44.519.800	57.738.360	53.326.370	48.929.950
Kab. Sarolangun	41.869.900	42.168.300	51.688.990	45.967.650	47.315.940
Kab. TanJabBar	0	0	3.750.500	3.548.560	540.720
Kab. TanJabTim	4.929.920	8.326.200	18.469.260	8.069.440	16.298.880
Kab. Tebo	39.982.200	42.574.700	34.161.960	41.950.160	50.680.030
Kota Jambi	32.235.900	34.673.200	40.010.140	48.534.605	50.248.330
Kota S.Penuh	32.878.200	50.546.600	18.749.835	27.503.860	27.039.360
<b>Total</b>	<b>335.006.755</b>	<b>398.131.500</b>	<b>399.985.165</b>	<b>445.538.165</b>	<b>430.218.700</b>

  

Kab/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
Kab. Batanghari	13.078.970	118.803.977	150.495.219	142.233.845	178.183.186
Kab. Bungo	65.452.560	150.318.390	202.023.765	192.980.604	213.576.534
Kab. Kerinci	61.401.060	143.231.058	162.712.254	52.270.604	193.048.215
Kab. Merangin	134.045.140	242.225.488	205.056.797	195.612.477	272.340.970
Kab. Ma. Jambi	50.633.470	25.489.715	173.165.458	62.652.221	199.399.895
Kab. Sarolangun	67.694.410	97.850.281	191.396.440	179.114.875	220.943.220
Kab. TanJabBar	5.467.508	111.078.502	135.468.172	142.753.764	175.209.230
Kab. TanJabTim	110.123.640	265.349.303	148.302.076	196.922.022	211.190.208
Kab. Tebo	48.766.856	141.631.826	139.749.991	130.525.855	171.113.732
Kota Jambi	107.133.110	347.564.967	234.067.165	277.298.116	239.346.630
Kota S.Penuh	40.221.070	119.076.027	97.175.217	92.350.598	112.798.570
<b>Total</b>	<b>704.017.794</b>	<b>1.762.619.534</b>	<b>1.839.612.554</b>	<b>1.664.714.983</b>	<b>2.187.150.390</b>

Sumber: Website Kemenkeu RI Tahun 2020(diolah)

Selanjutnya, Kabupaten/Kota yang paling sering menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) tertinggi setiap tahunnya adalah Kota Jambi, yaitu pada tahun 2016, 2017, dan 2018. Pada tahun 2015 dan 2019, kabupaten/kota yang menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) tertinggi adalah Kabupaten Merangin. Pada tahun 2010 dan 2012, kabupaten/kota yang menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) tertinggi adalah Kabupaten Muaro Jambi, pada tahun 2011 dan 2013 adalah Kabupaten Kerinci, dan pada tahun 2014 adalah Kabupaten Bungo.

Berdasarkan data pada tabel di atas, perkembangan total Dana Alokasi Khusus (DAK) dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2014 dan 2018. Pada tahun 2014, total Dana Alokasi Khusus (DAK) dari 11 kabupaten/kota mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2013, total Dana Alokasi Khusus (DAK) dari 11 kabupaten/kota adalah 445.538.165 ribu rupiah (445,54 miliar rupiah), sedangkan pada tahun 2014, total Dana Alokasi Khusus (DAK) dari 11 kabupaten/kota adalah 430.218.700 ribu rupiah (430,22 miliar rupiah). Artinya, total Dana Alokasi Khusus (DAK) dari 11 kabupaten/kota pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 15.319.465 ribu rupiah (15,32 miliar rupiah). Pada tahun 2018, total Dana Alokasi Khusus (DAK) dari 11 kabupaten/kota juga mengalami penurunan dari tahun

sebelumnya. Pada tahun 2017, total Dana Alokasi Khusus (DAK) dari 11 kabupaten/kota adalah 1.839.612.554 ribu rupiah (1,84 triliun rupiah), sedangkan pada tahun 2018, total Dana Alokasi Khusus (DAK) dari 11 kabupaten/kota adalah 1.664.714.983 ribu rupiah (1,66 triliun rupiah). Artinya, total Dana Alokasi Khusus (DAK) dari 11 kabupaten/kota pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 174.897.571 ribu rupiah (174,90 miliar rupiah).

Peningkatan total Dana Alokasi Khusus (DAK) dari 11 kabupaten/kota yang paling besar adalah pada tahun 2016. Pada tahun sebelumnya (2015), total Dana Alokasi Khusus (DAK) dari 11 kabupaten/kota adalah sebesar 704.017.794 ribu rupiah (704,02 miliar rupiah), sedangkan pada tahun 2016 meningkat menjadi 1.762.619.534 ribu rupiah (1,76 triliun rupiah). Artinya, total Dana Alokasi Khusus (DAK) dari 11 kabupaten/kota pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 1.058.601.740 ribu rupiah (1,06 triliun rupiah). Selain itu, peningkatan total Dana Alokasi Khusus (DAK) dari 11 kabupaten/kota yang cukup besar juga terjadi pada tahun 2019. Pada tahun sebelumnya (2018), total Dana Alokasi Khusus (DAK) dari 11 kabupaten/kota adalah sebesar 1.664.714.983 ribu rupiah (1,66 triliun rupiah), sedangkan pada tahun 2019 meningkat menjadi 2.187.150.390 ribu rupiah (2,19 triliun rupiah). Artinya, total Dana Alokasi Khusus (DAK) dari 11 kabupaten/kota pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 522.435.407 ribu rupiah (522,43 miliar rupiah).

### Hasil analisis perkembangan alokasi DBH di Provinsi Jambi

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

**Tabel 3.** Alokasi DBH di Provinsi Jambi Tahun 2010-2019 (Ribu Rupiah)

Kab/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
Kab. Batanghari	119.355.713	154.720.622	236.624.112	252.073.913	203.586.336
Kab. Bungo	105.991.000	101.245.683	123.851.473	136.319.629	128.211.772
Kab. Kerinci	38.020.281	80.157.445	91.294.633	87.757.391	77.693.636
Kab. Merangin	94.223.000	102.032.311	112.789.252	138.532.117	113.836.776
Kab. Ma. Jambi	142.270.000	151.612.926	213.677.097	208.246.455	181.103.202
Kab. Sarolangun	128.495.000	132.355.926	173.504.128	181.278.559	163.645.851
Kab. TanJabBar	235.725.293	499.849.808	542.033.358	567.051.447	478.607.190
Kab. TanJabTim	220.716.222	293.517.537	343.891.598	371.005.810	312.157.864
Kab. Tebo	82.704.000	99.275.034	132.938.314	160.231.247	141.838.519
Kota Jambi	124.162.000	127.594.017	158.088.679	146.767.548	123.603.433
Kota S.Penuh	32.070.739	71.733.457	86.224.939	83.011.918	71.422.976
<b>Total</b>	<b>1.323.733.249</b>	<b>1.814.094.766</b>	<b>2.214.917.584</b>	<b>2.332.276.035</b>	<b>1.995.707.555</b>

  

Kab/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
Kab. Batanghari	155.263.251	162.728.403	133.747.031	140.272.762	201.974.097.611
Kab. Bungo	88.537.498	74.085.974	68.394.813	88.485.360	108.802.418.000
Kab. Kerinci	45.549.849	50.061.841	55.350.54	58.499.359	70.285.174.000
Kab. Merangin	75.670.977	66.763.681	72.922.493	63.774.751	74.683.722.000
Kab. Ma. Jambi	138.983.691	145.856.886	112.507.381	132.951.565	168.212.604.000
Kab. Sarolangun	113.475.294	117.069.201	100.806.829	121.162.219	138.073.176.394
Kab. TanJabBar	325.234.272	430.407.431	281.241.182	447.009.791	548.453.481.763
Kab. TanJabTim	191.245.875	169.194.986	128.786.193	168.165.542	188.228.291.742
Kab. Tebo	98.567.843	99.486.243	76.113.071	93.604.427	84.908.375.600
Kota Jambi	83.342.923	102.727.973	99.096.282	118.526.144	137.956.917.000
Kota S.Penuh	41.926.784	45.658.265	37.849.584	56.720.758	67.954.902.214
<b>Total</b>	<b>1.357.798.257</b>	<b>1.464.040.884</b>	<b>1.166.815.406</b>	<b>1.489.172.678</b>	<b>1.789.533.160.324</b>

*Sumber: Website Kemenkeu RI Tahun 2020(diolah)*

Dana Bagi Hasil (DBH) yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2010-2019 yang bersumber dari website resmi Kemenkeu yang dinyatakan dalam satuan ribu rupiah. Perkembangan alokasi DBH di Provinsi Jambi tahun 2010-2019 disajikan pada Tabel 3.

Setiap tahunnya, jumlah Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima oleh setiap kabupaten/kota bersifat fluktuatif (pola perkembangannya tidak tetap/berbeda-beda). Artinya, jumlah Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima oleh setiap kabupaten/kota terkadang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun terkadang juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Kabupaten/kota yang menerima Dana Bagi Hasil (DBH) terendah setiap tahunnya adalah Kota Sungai Penuh, sedangkan kabupaten/kota yang menerima Dana Bagi Hasil (DBH) tertinggi setiap tahunnya adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Berdasarkan data pada tabel di atas, perkembangan total Dana Bagi Hasil (DBH) dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi mengalami peningkatan pada tahun 2010 sampai 2013, sedangkan pada tahun 2014 total Dana Bagi Hasil (DBH) dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi mengalami penurunan. Begitu pula pada tiga tahun berikutnya (2015 sampai 2017), total Dana Bagi Hasil (DBH) dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi terus mengalami penurunan. Pada tahun 2018 dan 2019, total Dana Bagi Hasil (DBH) dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi mengalami peningkatan kembali.

#### **Hasil analisis kondisi tingkat ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi**

Perhitungan Indeks Williamson Provinsi Jambi tahun 2010-2019 dapat dilihat pada tabel 4. Berdasarkan data pada tabel 4, menunjukkan nilai Indeks Williamson Provinsi Jambi pada tahun 2010-2019 cenderung mengalami penurunan, kecuali pada tahun 2016 dan 2018. Pada tahun 2016, nilai Indeks Williamson Provinsi Jambi adalah sebesar 0,43 dimana nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,01 dari tahun sebelumnya (tahun 2015) yang memiliki nilai Indeks Williamson sebesar 0,42. Pada tahun 2018, nilai Indeks Williamson Provinsi Jambi adalah sebesar 0,44 dimana nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,04 dari tahun sebelumnya (tahun 2017) yang memiliki nilai Indeks Williamson sebesar 0,40. Nilai rata-rata Indeks Williamson Provinsi Jambi pada tahun 2010-2019 adalah sebesar 0,47 sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi berada pada kategori sedang.

**Tabel 4.** Indeks Williamson Provinsi Jambi Tahun 2010-2019

<b>Tahun</b>	<b>Indeks Williamson (Indeks ketimpangan)</b>
2010	0,53
2011	0,52
2012	0,51
2013	0,50
2014	0,48
2015	0,42
2016	0,43
2017	0,40
2018	0,44
2019	0,43

*Sumber: Data diolah(2020).*

#### **Hasil analisis pengaruh alokasi dana perimbangan (DAU, DAK dan DBH) terhadap interpretasi model persamaan regresi**

Interpretasi yang dilakukan terhadap koefisien regresi meliputi dua hal, yaitu tanda dan besaran. Tanda menunjukkan arah hubungan. Tanda dapat bernilai positif atau negatif. Positif menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel bebas terhadap variabel terikat, sedangkan negatif menunjukkan pengaruh yang berlawanan arah. Searah maksudnya adalah, apabila variabel bebas mengalami kenaikan/peningkatan/bertambah maka variabel terikat akan mengalami hal yang sama kenaikan/peningkatan/bertambah. Sedangkan apabila variabel bebas mengalami penurunan/ pengurangan maka akan berdampak kepada variabel terikat yang akan mengalami penurunan/pengurangan juga. Berlawanan arah maksudnya apabila variabel bebas mengalami kenaikan/ peningkatan/bertambah maka variabel terikat akan mengalami hal yang sebaliknya yaitu penurunan/pengurangan. Sebaliknya, apabila variabel bebas mengalami penurunan/pengurangan maka variabel terikat akan mengalami peningkatan/bertambah. Besaran menjelaskan nominal slope persamaan regresi. Model Regresi Log-Berganda yang telah diestimasi adalah sebagai berikut:

$$Iw = 2,323267 + 0,095481 \text{ DAU} - 0,157826 \text{ DAK} + 0.003034 \text{ DBH} + e$$

Angka-angka yang tertera pada persamaan diambil dari tabel estimasi output Persamaan 1. Koefisien regresi untuk variabel DAU sebesar 0,095481, koefisien regresi untuk variabel DAK sebesar -0,157826 dan koefisien regresi untuk variabel DBH sebesar 0,003034. Koefisien regresi DAU bernilai positif artinya pada saat nilai DAU meningkat, maka Indeks Ketimpangan (Ketimpangan antar Daerah di Provinsi Jambi) juga akan mengalami peningkatan. Begitu pula pada saat nilainya menurun maka Indeks Ketimpangan (Ketimpangan antar Daerah di Provinsi Jambi) juga akan mengalami penurunan. Peningkatan nilai DAU sebesar 1 persen akan meningkatkan Indeks Ketimpangan (Ketimpangan antar Daerah di Provinsi Jambi) sebesar 0,095 persen dan sebaliknya, penurunan nilai DAU sebesar 1 persen akan menurunkan Indeks Ketimpangan (Ketimpangan antar Daerah di Provinsi Jambi) sebesar 0,095 persen.

Koefisien regresi DAK bernilai negatif artinya pada saat nilai DAK meningkat, maka Indeks Ketimpangan (Ketimpangan antar Daerah di Provinsi Jambi) akan mengalami penurunan. Begitu pula pada saat nilainya menurun maka Indeks Ketimpangan (Ketimpangan antar Daerah di Provinsi Jambi) juga akan mengalami peningkatan. Peningkatan nilai DAK sebesar 1 persen akan menurunkan Indeks Ketimpangan (Ketimpangan antar Daerah di Provinsi Jambi) sebesar 0,158 persen dan sebaliknya, penurunan nilai DAU sebesar 1 persen akan meningkatkan Indeks Ketimpangan (Ketimpangan antar Daerah di Provinsi Jambi) sebesar 0,158 persen.

Koefisien regresi untuk variabel DBH bernilai positif. Namun, variabel DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Ketimpangan (Ketimpangan antar Daerah di Provinsi Jambi). Dengan demikian, peningkatan atau penurunan nilai DBH cenderung tidak mempengaruhi (meningkatkan/menurunkan) Indeks Ketimpangan (Ketimpangan antar Daerah di Provinsi Jambi).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Adapun beberapa kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Perkembangan alokasi Dana Perimbangan (DAU, DAK dan DBH) di Provinsi Jambi cenderung mengalami peningkatan. Perkembangan tingkat ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi cenderung mengalami penurunan. Nilai rata-rata Indeks Williamson Provinsi Jambi pada tahun 2010-2019 adalah sebesar 0,47 sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi berada pada kategori sedang. DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap tingkat ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi, sedangkan DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat

ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi. Koefisien regresi untuk variabel DAU sebesar 0,095481, koefisien regresi untuk variabel DAK sebesar -0,157826 dan koefisien regresi untuk variabel DBH sebesar 0,003034. Koefisien regresi DAU bernilai positif, artinya pada saat nilai DAU meningkat, maka Indeks Ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi akan mengalami peningkatan. Koefisien regresi untuk variabel DAK bernilai negatif, artinya pada saat nilai DAK meningkat, maka Indeks Ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi akan mengalami penurunan. Koefisien DBH bernilai positif, namun variabel DBH tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi, sehingga peningkatan atau penurunan nilai DBH cenderung tidak mempengaruhi Indeks Ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi.

### **Saran**

Adapun beberapa saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pemerintah Daerah Provinsi Jambi beserta Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Jambi agar terus berupaya untuk meningkatkan jumlah alokasi dana perimbangan yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat untuk kebutuhan daerah. Pemerintah Daerah Provinsi Jambi beserta Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Jambi agar terus berupaya untuk menurunkan tingkat ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi melalui instrumen dana perimbangan. Pemerintah Pusat agar lebih meningkatkan proporsi alokasi DAK dan menurunkan proporsi alokasi DAU untuk mengurangi ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Katamso, Syaparuddin, Junaidi, Amir, A. (2018). Factors Affecting Regional Disparities in Indonesia 1985-2015. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 9 (16), 110 -119
- Koncoro, M. (2003). *Kesenjangan antar Wilayah*. Erlangga: Jakarta
- Prakosa, Kesit Bambang. (2004). Analisa Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Propinsi Jawa Tengah dan DIY. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia (JAAI)*, 8(2), 101-118.
- Rosmeli.(2010). *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan antar Wilayah di Indonesia*.
- Rosmeli.(2018). Dampak Infrastruktur Terhadap Ketimpangan Pembangunan antar Daerah di Provinsi Jambi. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*. 2 (1), 79-84
- Sjafrizal.(1985). *Teori Ekonomi Regional: Konsep dan Perkembangan, dalam Memelihara Momentum Pembangunan*. Gramedia: Jakarta
- Sjafrizal.(2008). *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi Ketimpangan Pembangunan antar Wilayah.*, Niaga Swadaya, Niaga Swadaya: Jakarta:
- Sukirno, Sadono.(2010). *Teori Pengantar Makroekonomi Edisi Ketiga*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Sukwika, Tatan.(2018). Peran Pembangunan Infrastruktur terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Indonesia. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*. 6(2),115-130.
- Waluyo, Joko. (2007). *Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan antardaerah di Indonesia*.
- Widjaja, H.A.W. (2002). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*. PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta